



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Cetak Biru

Kerja Sama Ekonomi Dan Keuangan Bilateral



Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral
Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CETAK BIRU

KERJA SAMA EKONOMI
DAN KEUANGAN
BILATERAL





DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	
SAMBUTAN MENTERI KEUANGAN	7
RINGKASAN EKSEKUTIF	11
BAB 1. LATAR BELAKANG.	13
Laju perubahan dunia	
Peran dan Kepentingan Indonesia	
BAB 2. REVIEW KERJA SAMA BILATERAL	19
Kerja sama bilateral untuk menjaga stabilitas ekonomi regional dan global	
a. Pemantauan dan diplomasi ekonomi	19
b. Kerja sama bilateral sebagai proxy kerja sama forum regional dan global	20
c. Kerja sama bilateral untuk meningkatkan kerja sama teknik	20
Kerja sama bilateral untuk meningkatkan pendapatan negara	21
a. Kerja sama bilateral dalam rangka optimalisasi pendapatan dari sektor pajak	21
b. Kerja sama kepabeanan dan cukai untuk meningkatkan pendapatan negara	23
c. Dukungan negosiasi perjanjian perdagangan dan investasi	25
Kerja sama bilateral dalam mendukung pengelolaan pembiayaan dan hibah yang optimal dan <i>prudent</i>	26
Kerja sama bilateral dalam rangka mendorong belanja yang produktif dan berkualitas	28
BAB 3. PETA JALAN KERJA SAMA BILATERAL	31
Agenda Kunci Kerja Sama Bilateral	31
Penguatan daya saing dan produktifitas ekonomi	31
Pencapaian pembangunan berkelanjutan	32
Penguatan tata kelola ekonomi internasional	33

Penguatan Kapasitas Dalam Negeri	34
Rencana aksi	34
BAB 4. PRIORITAS KEMITRAAN	39
Elemen Prioritas Kemitraan	39
Kapasitas ekonomi	39
Keterlibatan dalam hubungan internasional	41
Kemampuan keuangan	42
Kemampuan keamanan	43
Penguasaan pengetahuan	44
Keterkaitan antara Agenda Kunci Kerja Sama dan Prioritas Kemitraan	45
BAB 5. IMPLEMENTASI DAN EVALUASI	47
Kebutuhan Infrastruktur untuk Implementasi (<i>Enabling Environment</i>)	47
Review periodik	48



SAMBUTAN MENTERI KEUANGAN

Perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja positif dari waktu ke waktu. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri terdapat risiko pembalikan (*downside risks*) atas pertumbuhan tersebut dengan frekuensi dan kompleksitas yang semakin meningkat. Pelambatan ekonomi, dan bahkan krisis ekonomi global, merupakan contoh risiko yang selalu memunculkan penyebab yang berbeda. Saat ini, krisis tidak lagi semata menjadi domain negara-negara berkembang, mengingat pada krisis terakhir di tahun 2008, justru terjadi di negara-negara maju.

Salah satu elemen utama yang berkontribusi dan sulit dikontrol untuk tercapainya pertumbuhan yang berkelanjutan adalah faktor eksternal yang berkaitan dengan lingkungan regional dan global. Kinerja ekonomi Indonesia saat ini mendapat tantangan dari kemajuan teknologi yang semakin pesat, yang mengubah pola produksi dan rantai konsumsi;

lingkungan geopolitik yang dinamis; serta kebijakan negara-negara besar yang sulit diprediksi, dan sering kali menjadi anti tesis atas peran yang seharusnya mereka lakukan. Faktor-faktor di atas membutuhkan kesiapan dan kemampuan yang lebih besar dalam pemanfaatan sumber daya dan reformasi struktural yang dibutuhkan, serta untuk mendukung peran proaktif Indonesia dalam kancah kerja sama internasional, sehingga kinerja perekonomian Indonesia dapat sesuai harapan.

Kementerian Keuangan seyogyanya berperan penting di dalam berbagai forum kerja sama internasional guna menciptakan tatanan perekonomian global dan regional yang lebih adil, selain tentunya untuk mencapai kepentingan nasional. Peran tersebut tidak hanya dalam konteks multilateral, regional, namun juga dalam kerangka bilateral. Indonesia juga perlu meningkatkan kerja sama dengan mitra bilateral di berbagai sektor, selain berkontribusi aktif dalam

forum-forum seperti G-20 dan ASEAN. Pendekatan bilateral memperoleh perhatian lebih dari negara-negara kunci seperti halnya Amerika Serikat dan China, karena dinilai dapat mendatangkan hasil yang lebih nyata dibanding pendekatan multilateral. Tambahan pula, pendekatan bilateral memudahkan kepentingan nasional untuk dapat menjadi bagian dari kesepakatan antar negara.

Kerja sama internasional melalui pendekatan bilateral perlu ditanggapi serius dengan kejelasan arah, prioritas, dan strategi kerja sama, dengan memperhatikan karakteristik setiap negara mitra. Salah satu komponen utama bagi pendekatan bilateral adalah adanya suatu panduan yang dapat memberikan pengertian dan pesan yang seragam bagi para pihak yang melakukan kerja sama. Komponen utama tersebut berupa Cetak Biru Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Bilateral (Cetak Biru) yang diharapkan dapat menjadi panduan bagi para pejabat dan staf Kementerian Keuangan dalam melakukan kerja sama bilateral dengan negara-negara tertentu, berdasarkan prioritas, secara lebih terarah dan efektif.

Sebagaimana disinggung dalam Cetak Biru ini, diplomasi yang aktif dan kemitraan yang kuat, baik dengan pemerintah maupun pihak swasta negara mitra, merupakan modal penting bagi tercapainya hasil yang maksimal dari suatu kerja sama bilateral di bidang ekonomi dan keuangan. Disamping itu, kerja sama bilateral akan optimal apabila dibarengi dengan sikap terbuka, saling menguntungkan, inklusif, dan konsisten dengan norma kerja sama internasional yang berlaku, serta sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

Insan Kementerian Keuangan perlu memastikan bahwa kerja sama bilateral yang dilakukan memberikan manfaat yang lebih besar dibanding potensi kewajiban bagi bangsa dan rakyat Indonesia, terutama dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi dan kualitas lingkungan hidup. Oleh karenanya, kerja sama ekonomi keuangan saat ini dan di masa mendatang perlu memperhatikan agenda penguatan produktifitas dan daya saing ekonomi, pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, serta penguatan kapasitas sumber daya

manusia maupun kelembagaan dalam negeri. Tak kalah pentingnya, kerja sama bilateral juga perlu diupayakan untuk berkontribusi pada penguatan tata kelola ekonomi keuangan internasional.

Lingkungan eksternal Indonesia, baik di lingkup bilateral dan regional maupun global niscaya akan selalu berubah. Oleh karenanya, insan Kementerian Keuangan perlu memastikan bahwa kerja sama Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan maupun internasional, harus bernuansa dinamis dengan fleksibilitas yang memadai, tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Oleh karenanya, evaluasi atas Cetak Biru yang didasarkan pada perubahan lingkungan internasional perlu terus dilakukan.

Sebelum mengakhiri sambutan, saya sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Badan Kebijakan Fiskal dan semua pihak, baik individu maupun institusi di internal dan eksternal Kementerian Keuangan (termasuk duta besar dan diplomat senior kedutaan besar dari 26 negara sahabat) yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan Cetak Biru ini. Saya berharap Cetak Biru ini dapat menjadi panduan bagi insan Kementerian Keuangan khususnya, dan masukan bagi pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah, dalam melaksanakan kerja sama internasional, khususnya dalam kerja sama bilateral dengan negara-negara mitra Indonesia.

Menteri Keuangan



Sri Mulyani Indrawati

Halaman Kosong



RINGKASAN EKSEKUTIF

Peran Indonesia dalam ekonomi global dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan peningkatan skala perekonomian Indonesia.

Sebagai pemilik ekonomi terbesar di Asia Tenggara serta 16 besar dunia, Indonesia perlu menyikapi perubahan kemampuan ekonomi tersebut dengan cermat. Sejarah mengajarkan bahwa ketika ekonomi berkembang, strategi juga perlu berubah.

Menyikapi perubahan posisi dan peran Indonesia pada tatanan ekonomi global, kebijakan kerja sama ekonomi dan keuangan luar negeri juga perlu direncanakan dan ditata lebih baik lagi. Perencanaan dan penataan kebijakan yang baik diharapkan akan memberikan arah yang jelas bagi kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral yang berujung pada tercapainya tujuan kerja sama.

Saat ini, keterlibatan Kementerian Keuangan dalam kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral dirasa belum optimal. Ketidakefektifan tersebut terjadi, satu di antaranya adalah akibat belum ada panduan yang jelas akan arah kerja sama. Selain itu, target capaian yang terukur juga belum ada. Ditambah lagi, strategi atas kerja sama internasional di bidang ekonomi dan keuangan pun tidak dapat ditemukan dalam berbagai dokumen.

Dalam merencanakan dan menata ulang kerja sama bilateral di bidang ekonomi dan keuangan, setidaknya ada dua hal besar yang perlu diperhatikan. Pertama terkait dengan evaluasi atas efektivitas kerja sama yang telah dilakukan;

dan kedua, berhubungan dengan tersedianya peta jalan (*road map*) untuk kerja sama di masa mendatang.

Evaluasi terhadap efektivitas kerja sama bilateral sangat terkait dengan kebijakan yang diambil, proses yang dijalankan, serta manfaat yang diraih. Dalam kaitan ini, dapat dikatakan Kementerian Keuangan memiliki kebijakan yang belum begitu jelas akan target kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral. Proses kerja sama yang selama ini dilakukan pun lebih banyak merespon mitra wicara, daripada mendorong suatu isu/agenda nasional ke dalam kerja sama bilateral. Akibatnya, manfaat yang didapat pun seringkali tidak terukur.

Memprediksi masa depan tentu memiliki risiko; namun menjalani masa depan tanpa rencana jauh lebih berisiko. Di sinilah kemudian, sebuah peta jalan yang jelas diperlukan untuk memastikan kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral di masa mendatang menjadi lebih terarah. Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (PKRB), Badan Kebijakan Fiskal, menyusun

cetak biru kebijakan kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral ini sebagai panduan bagi para pihak yang terkait di Kementerian Keuangan untuk menentukan agenda, memastikan sasaran, membuat prioritas, dan menyusun strategi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral untuk 5 sampai dengan 10 tahun mendatang.

Cetak Biru mengkaji kembali kerja sama bilateral yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan, dengan menggunakan pilar kebijakan keuangan negara sebagai kerangka kerjanya. Pilar-pilar tersebut meliputi: i) peningkatan pendapatan yang berkualitas, (ii) pengelolaan pembiayaan yang *prudent*, (iii) belanja yang produktif dan berkualitas, serta (iv) usaha menjaga stabilitas ekonomi makro. Selanjutnya, berdasarkan analisis yang dilakukan, terdapat empat agenda kunci yang dinilai penting sebagai kerangka objektif agenda nasional yang perlu diperjuangkan dalam setiap kebijakan kerja sama ekonomi dan keuangan. Keempat agenda kunci tersebut adalah: (i) peningkatan produktifitas dan daya saing ekonomi, (ii) pembangunan yang berkelanjutan, (iii) peningkatan tata kelola ekonomi

keuangan internasional, dan (iv) optimalisasi kerja sama bilateral untuk mendorong penguatan kapasitas dalam negeri.

Keempat agenda kunci di atas juga diperlukan sebagai acuan dalam melakukan rencana aksi kerja sama bilateral antara Kementerian Keuangan dengan mitra bilateral, yang dalam cetak biru ini dikelompokkan berdasarkan kemampuan ekonomi, keterlibatan internasional, kemampuan keuangan, penguasaan teknologi, dan kemampuan pertahanan. Dengan adanya pengelompokan negara-negara mitra, diharapkan kerja sama ekonomi dan keuangan nantinya akan lebih optimal dan terukur, dengan memperhatikan, sumber daya, karakteristik, dan kapasitas dari setiap negara.

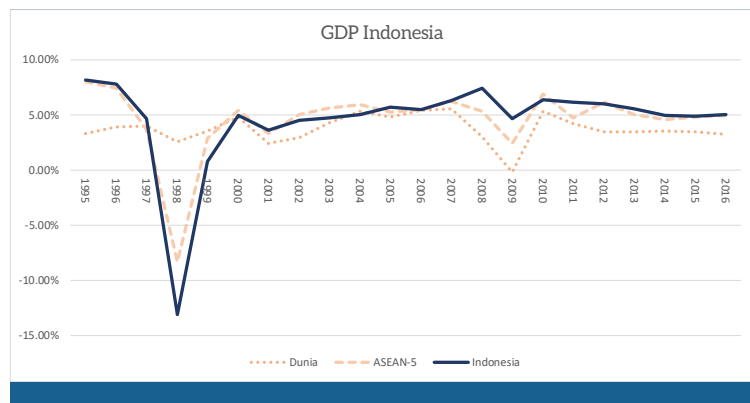
BAB 1

LATAR BELAKANG

Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia turut dipengaruhi oleh kondisi perekonomian eksternal baik pada tingkat negara mitra, situasi regional, maupun secara global, baik melalui jalur hubungan perdagangan, investasi dan aliran modal, maupun kebijakan dan situasi keuangan internasional lainnya yang berdampak pada aktifitas perekonomian di Indonesia.

Kondisi perekonomian internasional memberikan berbagai tantangan bagi Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada periode krisis di kawasan Asia pada tahun 1998, maupun krisis Amerika-Eropa pada tahun 2008, yang berdampak pada perlambatan ekonomi global berkepanjangan, termasuk terhadap Indonesia. Oleh karenanya, tantangan untuk menjaga stabilitas perekonomian tersebut semakin besar dan komprehensif seiring dengan terjadinya ketidakseimbangan struktural ekonomi dunia yang semakin meningkat, ketidakstabilan geopolitik kawasan, serta meningkatnya sentimen kebijakan proteksionisme yang dapat mengancam keberlanjutan pertumbuhan ekonomi secara global.

Perkembangan ekonomi global semakin dinamis dan seringkali tidak terprediksi. Kondisi ini ditandai dengan maraknya kebijakan-kebijakan yang seringkali di luar pola yang selama ini dianut oleh banyak negara. Keterbukaan dan integrasi ekonomi yang menjadi dasar hubungan ekonomi antar negara, mendapatkan tantangan dari munculnya ekonomi nasionalistik yang cenderung melindungi kepentingan dalam negeri secara



berlebihan, tanpa mempertimbangkan pembagian keuntungan dengan negara lain. Di saat yang sama, perubahan geopolitik internasional maupun

kawasan, yang seringkali tidak terduga, juga berpotensi berdampak pada situasi ekonomi nasional. Keluarnya Inggris dari *European Union*, kebangkitan *populism* di Eropa, semakin tingginya tensi politik di Timur Tengah, serta ancaman keamanan di Semenanjung Korea, Laut China Selatan, maupun Filipina Selatan, berpotensi menjadi faktor yang menghambat laju ekonomi di semua tingkatan (nasional, kawasan, maupun global).

Secara sederhana, perkembangan wajah dunia akhir-akhir ini tercermin dalam terminologi *VUCA (Volatile-Uncertain-Complex and Ambiguity)*. *VUCA* merupakan sebuah dampak dari era teknologi informasi yang semakin canggih, yang membuat situasi dunia sangat rentan oleh perubahan yang serba mendadak, tidak terkecuali sektor ekonomi dan keuangan.



Laju Perubahan dunia

Percepatan perubahan dunia terutama di bidang ekonomi dan keuangan sangat dipengaruhi oleh: (i) kecepatan perubahan teknologi; (ii) perkembangan kapasitas organisasi baik pemerintah maupun swasta; dan (iii) peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketiga variabel ini merupakan faktor pendorong pergerakan arus barang/jasa dan modal antar negara secara langsung sekaligus cepat.

Fenomena kemajuan teknologi informasi menjadi variabel paling dinamis dan menentukan bagi hubungan antar pemerintah, antar pelaku bisnis, dan antar masyarakat, terutama dalam pola perdagangan dan sistem transaksi saat ini. Peralihan sistem keuangan konvensional menuju sistem keuangan digital secara perlahan juga terus berjalan. Akibatnya, muncul model dan proses bisnis baru yang lebih inovatif, serta semakin menggeser pola perilaku ekonomi dan keuangan dunia.

Di sisi lain, lembaga pemerintah maupun swasta dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan jaman serta mengantisipasi kecepatan perubahan dan pergerakan pasar dunia. Kompleksitas global yang penuh ketidakpastian membutuhkan kemampuan organisasi yang efektif dan responsif meski berada dalam tekanan yang tidak terprediksi sekalipun sebelumnya. Khusus pemerintah, perkembangan dunia juga menuntut lahirnya kebijakan-kebijakan baru, maupun perubahan kebijakan, sebagai konsekuensi dari lahirnya model ekonomi baru, yang sebelumnya belum difasilitasi oleh kerangka peraturan yang ada.

Lebih lanjut, perubahan dunia menuntut perbaikan kualitas sumber daya manusia, yang juga merupakan salah satu kunci dalam menghadapi perkembangan hubungan ekonomi internasional. Dalam kaitan ini, penguasaan atas pengetahuan dan teknologi merupakan sebuah tantangan yang tidak bisa dihindari. Dalam konteks hubungan ekonomi internasional, *technology spillover* sebagai dampak dari *foreign direct investment*, seharusnya diupayakan untuk memberikan kontribusi positif bagi peningkatan pengetahuan, perkembangan inovasi, dan kemampuan kompetitif dari ekonomi nasional. Tantangan lainnya—yang sekaligus menjadi peluang—adalah semakin tingginya mobilitas tenaga kerja lintas negara. Mobilitas tenaga kerja antar negara yang ditunjang

dengan kemudahan transportasi dan peraturan imigrasi menjadi tantangan tersendiri dalam mengelola *human capital* sebuah negara.

Peran dan Kepentingan Indonesia

Peran Indonesia dalam percaturan ekonomi global, dari tahun ke tahun, semakin menguat seiring dengan peningkatan skala perekonomiannya. Dengan trend pertumbuhan ekonomi yang rata-rata di atas 5% per tahun, Indonesia memiliki modal besar untuk turut serta berkontribusi dalam menciptakan sistem perekonomian global yang kuat. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit banyak dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, khususnya harga komoditas, kinerja perdagangan dunia, arus investasi, dan kebijakan-kebijakan negara maju.

Ekonomi Indonesia diprediksi akan tumbuh di tahun-tahun mendatang. Selain faktor perbaikan harga-harga komoditas dan arus investasi asing, konsumsi masyarakat juga memiliki peran dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dengan tingkat inflasi yang relatif terkendali, daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga terus terjaga dan berkontribusi besar pada pertumbuhan. Jumlah populasi Indonesia yang besar dengan kelompok produktif yang signifikan, diperkirakan masih akan memberikan dampak terhadap konsumsi masyarakat di tahun-tahun

mendatang, sekaligus akan menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Indonesia berkepentingan untuk mendorong peningkatan akses pasar bagi produk-produk domestik ke pasar internasional, meningkatkan arus investasi asing ke dalam negeri, serta menjaga momentum perbaikan pertumbuhan ekonomi nasional. Guna meningkatkan akses pasar, Indonesia berupaya untuk tetap mempertahankan pasar utama yang selama ini telah dimiliki, yang didukung dengan upaya membuka pasar-pasar non-tradisional dan diversifikasi produk. Dalam kaitan ini, pemetaan prioritas dan potensi pasar negara mitra diarahkan untuk menggali lebih dalam akan kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh produk Indonesia. Pada saat yang sama, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan daya saing produk nasional perlu terus ditingkatkan; selain untuk memperkuat penetrasi pasar, juga untuk mengamankan pasar dan industri dalam negeri.

Sementara itu, peningkatan arus investasi asing saat ini ditopang dengan upaya perbaikan iklim usaha melalui penyederhanaan prosedur

investasi, penerbitan paket kebijakan, serta pemberian insentif. Strategi ini diharapkan dapat menarik arus investasi yang lebih besar, yang sementara ini masih terpengaruh oleh perlambatan pertumbuhan global akibat ketidakpastian dan belum stabilnya ekonomi internasional.

Sebagai pemilik ekonomi terbesar di Asia Tenggara serta ke-16 di dunia, Indonesia perlu menyikapi perubahan ekonomi politik global secara cermat, khususnya melalui kebijakan kerja sama ekonomi dan keuangan yang terencana. Sebagai salah satu *focal point* kerja sama internasional di Kementerian Keuangan, Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (PKRB) memandang perlu untuk menyusun sebuah cetak biru kerja sama bilateral guna menyikapi dinamika ekonomi politik global saat ini dan di masa mendatang. Kerja sama bilateral dipandang penting mengingat hasil dan manfaat yang diperoleh lebih nyata (*tangible*) dan mudah terukur, karena kedua negara mitra dapat saling mengetahui potensi, kepentingan, dan agenda masing-masing pihak secara jelas. Di masa mendatang, kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral diprediksi akan makin dinamis dan diyakini mampu

mengembalikan interaksi ekonomi antar negara secara lebih *fair* dan saling menguntungkan.

Cetak biru kerja sama bilateral dilandaskan pada pemahaman strategis di berbagai tingkatan jabatan dan unit di Kementerian Keuangan sesuai dengan kewenangannya. Cetak biru diharapkan akan memudahkan semua pihak untuk mencapai kesamaan pemahaman tentang potensi, peluang dan tantangan dalam hubungan bilateral. Selain itu, cetak biru ini diharapkan akan menjadi panduan bagi para pihak di Kementerian Keuangan untuk menentukan agenda, memastikan sasaran, membuat prioritas, dan menyusun strategi kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral dengan negara lain.

Cetak biru ini disusun berlandaskan *review* atas kerja sama bilateral yang telah dilakukan selama ini oleh unit terkait dalam lingkungan Kementerian Keuangan. *Review* tersebut terutama bertujuan untuk memberikan

pemahaman atas ruang lingkup dan keterkaitan kerja sama bilateral dengan pilar kebijakan keuangan negara yang meliputi: (i) peningkatan pendapatan yang berkualitas, (ii) pengelolaan pembiayaan yang *prudent*, (iii) belanja yang produktif dan berkualitas, serta (iv) usaha menjaga stabilitas ekonomi makro.

Selanjutnya disusun pula peta jalan kerja sama bilateral untuk 5-10 tahun mendatang, terutama dalam kaitannya dengan kerangka obyektif agenda pembangunan nasional yang mencakup: (i) peningkatan produktifitas dan daya saing ekonomi; (ii) pembangunan yang berkelanjutan; (iii) peningkatan tata kelola ekonomi keuangan internasional; dan (iv) optimalisasi kerja sama bilateral untuk mendorong penguatan kapasitas dalam negeri.

“Kementerian Keuangan
melakukan pemantauan
serta diplomasi ekonomi dan
keuangan bilateral untuk
mendorong stabilitas ekonomi
regional dan global



BAB 2

REVIEW KERJA SAMA BILATERAL

Dalam bab ini, dipaparkan *review* atas peran serta capaian kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Terdapat empat aspek yang disampaikan dalam bab ini, yakni menyangkut kerja sama bilateral untuk: (i) menjaga stabilitas ekonomi regional dan global; (ii) meningkatkan penerimaan negara; (iii) mendukung pengelolaan pembiayaan dan hibah yang optimal dan *prudent*; serta (iv) mendorong belanja yang produktif dan berkualitas.

Kerja sama bilateral untuk menjaga stabilitas ekonomi regional dan global

Kementerian Keuangan mempunyai peran penting untuk menyusun kebijakan dan implementasi kerja sama bilateral yang dapat mendorong stabilitas ekonomi nasional, regional dan global dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi domestik. Peran tersebut secara umum dapat dikelompokkan ke dalam: (i) peran pemantauan dan diplomasi ekonomi; (ii) peran kerja sama bilateral sebagai *proxy* (obyek antara) untuk kerja sama forum regional dan global; serta (iii) peran kerja sama bilateral terkait kerja sama teknis bagi penguatan kapasitas dalam negeri.

a. Pemantauan dan diplomasi ekonomi

Kementerian Keuangan melakukan pemantauan serta diplomasi ekonomi dan keuangan bilateral untuk mendorong stabilitas ekonomi regional dan global, yang diimplementasikan melalui pengembangan:

- Analisis faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dalam negeri seperti perlambatan ekonomi di China, ketidakstabilan ekonomi politik di Uni Eropa, perkembangan kebijakan proteksionis di Amerika Serikat, serta perubahan geopolitik di Timur Tengah.
- Diplomasi ekonomi dengan negara mitra guna mendorong munculnya kebijakan-kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi regional dan global, mencegah terjadinya guncangan pasar, dan menghindari proteksionisme perdagangan.
- Forum-forum konsultasi dan dialog dengan negara mitra untuk meningkatkan keyakinan pelaku pasar internasional atas stabilitas ekonomi dan kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah.



b. Kerja sama bilateral sebagai proxy kerja sama forum regional dan global

Kementerian Keuangan secara aktif melakukan koordinasi kebijakan dengan mitra bilateral untuk mendorong agenda-agenda forum regional dan global termasuk G20, UNFCCC, APEC, ASEAN, dan sebagainya, antara lain melalui:

- Kerja sama pembangunan ekonomi hijau dan *Sustainable Development Goals* (SDGs), dengan Norwegia, Perancis, dan Inggris;
- Kerja sama pengembangan sistem *financial safety net* regional yang mencakup *Bilateral Swap Arrangement* (BSA) dengan Republik Korea dan Jepang, serta *Bilateral Currency Swap Arrangement* (BCSA) dengan China;
- Diplomasi keanggotaan Indonesia pada *Financial Action Task Force* (FATF); dan
- Reformasi tata kelola *Multilateral Development Banks* (MDBs).

c. Kerja sama bilateral untuk meningkatkan kerja sama teknik

Kementerian Keuangan secara aktif mendorong pengembangan kerja sama bilateral guna meningkatkan kapasitas kebijakan dan kemampuan teknis, seperti yang dilakukan dengan Pemerintah Inggris, Norwegia, dan Perancis terkait agenda-agenda pembangunan berkelanjutan; serta dengan Pemerintah Australia dan Jerman untuk penguatan pengelolaan kebijakan fiskal dan makro ekonomi.

Meski secara umum peran Indonesia dalam upaya kerja sama untuk menjaga stabilitas regional dan global telah terlihat, namun masih terdapat beberapa kegiatan yang belum optimal. Sebagai contoh, aktivitas pemantauan terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan negara-negara kunci masih bersifat sporadis, dan belum dilakukan secara reguler. Selain itu, analisis yang dilakukan masih belum secara jelas mengukur dampak yang mungkin timbul terhadap perekonomian Indonesia.

Lebih lanjut, kerja sama bilateral terkait SDGs belum bermanfaat secara optimal bagi Indonesia. Kerja sama dengan pemerintah Norwegia terkait pendanaan aksi-aksi penurunan emisi, misalnya, masih belum bisa terserap secara penuh akibat dari belum selesainya proses kesiapan kelembagaan di tingkat nasional. Di samping itu, prioritas kerja sama terkait agenda-agenda SDGs, yang sekaligus menjadi agenda nasional, belum terpetakan secara mendalam. Sehingga, kerja sama yang dilakukan masih bersifat merespon atas inisiatif dari negara mitra.

Selain itu, meskipun dialog kebijakan secara berkala telah dilakukan dengan beberapa negara, namun baru memberikan manfaat bagi penguatan proses penyusunan kebijakan fiskal dan makro ekonomi nasional. Dialog kebijakan yang ada saat ini belum menyentuh upaya konkret untuk aksi bersama dalam hal stabilisasi perekonomian regional maupun global.

Kerja sama bilateral untuk meningkatkan pendapatan negara

Dalam konteks pendapatan negara, Kementerian Keuangan berusaha memaksimalkan kerja sama bilateral untuk mendukung upaya peningkatan penerimaan negara baik langsung maupun tidak langsung. Upaya langsung dilakukan dengan meningkatkan pendekatan terhadap negara-negara mitra maupun lembaga keuangan internasional untuk memberikan dukungan keuangan. Sementara itu, upaya tidak langsung dilakukan dengan jalan mendorong perbaikan *best practise* dan tata kelola terkait perlakuan pajak antar negara, fasilitasi perdagangan internasional, maupun promosi investasi Indonesia.

a. Kerja sama bilateral dalam rangka optimalisasi pendapatan dari sektor pajak

Secara umum, Kementerian Keuangan menyadari pentingnya peran kerja sama bilateral dalam mendukung agenda internasional terkait perpajakan, termasuk di dalamnya: (i) mengatasi *tax planning, avoidance, and evasion (Base Erosion of Profit Shifting/BEPS)*; (ii) *pengaturan penghindaran pajak berganda (distributional issue)*; dan (iii) kerja sama perpajakan internasional lainnya.

Kementerian Keuangan juga melakukan pengembangan kebijakan untuk mengatasi praktek BEPS seperti *transfer pricing, thin capitalization, controlled foreign corporation (cfc), digital economy* serta melakukan evaluasi atas kesesuaiannya dengan rekomendasi OECD atas 15 aksi guna mengatasi penghindaran pajak. Selain itu, transparansi ekonomi keuangan internasional untuk kepentingan perpajakan juga terus didorong, terutama melalui kerja sama *Exchange of Information (EOI)* maupun *Automatic Exchange of Information (AEOI)*. Indonesia menjadi satu

dari seratus negara yang berkomitmen untuk menjalankan *Common Reporting Standard* (CRS), sebagaimana disusun oleh OECD dan G20. Pada tahun 2017, 50 negara telah menyatakan komitmen untuk mengimplementasikan CRS, dan Indonesia akan melaksanakannya pada tahun 2018 bersama negara-negara lainnya. Sebagai bukti keterlibatannya, Indonesia telah menerbitkan Perpu No. 1 tahun 2017 tentang akses keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Terkait pertukaran data dan informasi, Kementerian Keuangan telah menandatangani kerja sama AEOI dengan beberapa negara mitra strategis. Pada 16 Juni 2017, Indonesia telah menandatangani *Bilateral Competent Authority Agreement* (BCAA) sebagai dasar pertukaran data/informasi perpajakan. Sementara itu, dengan Swiss, Kementerian Keuangan telah memiliki *Joint Declaration* sebagai dasar komitmen untuk saling bertukar informasi keuangan yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam CRS, mulai tahun 2018. Lebih lanjut, Kementerian Keuangan juga telah bersepakat dengan otoritas perpajakan Singapura untuk saling bertukar data dan informasi. Kesepakatan ini akan memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan informasi terkait rekening wajib pajak di luar negeri secara otomatis, sehingga akan dapat mencegah dan mengurangi *offshore tax evasion*.

Hal lain yang telah dilakukan Kementerian Keuangan adalah meningkatkan pengaturan perpajakan internasional melalui kaji ulang atas Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), yang mencakup dua hal, yaitu (i) menyangkut manfaat serta tarif P3B atas 67 negara, dan (ii) Pencegahan dan penyelesaian sengketa perpajakan internasional. Selain itu, Kementerian Keuangan juga melakukan kerja sama dalam rangka penguatan kapasitas pegawai dan kelembagaan. Satu di antara berbagai bentuk kegiatannya adalah dengan melakukan pengiriman *secondment* pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ke *Australian Taxation Office* (ATO).

Terlepas dari capaian kerja sama bilateral di bidang perpajakan yang telah diperoleh selama ini, terdapat beberapa isu yang dirasa perlu diperbaiki di masa mendatang seperti halnya koordinasi antar unit di dalam Kementerian Keuangan terkait inisiatif perpajakan internasional yang dinilai masih lemah. Pembagian informasi antar unit terkait perkembangan negosiasi kerja sama perpajakan antar negara belum terlaksana dengan baik, sehingga menciptakan informasi yang tidak berimbang, dan berakibat pada perbedaan pemahaman atas isu-isu perpajakan diantara para pihak yang terkait dengan kerja sama bilateral.

Dialog dengan negara-negara yang memiliki perhatian serupa atas isu-isu perpajakan global yang dalam 5 tahun terakhir berkembang pesat, seperti *e-commerce* dan *carbon tax*, belum banyak dilakukan, sehingga cara pandang, pengetahuan, dan pengalaman negara mitra atas isu-isu tersebut belum banyak diketahui.



b. Kerja sama kepabeanan dan cukai untuk meningkatkan pendapatan negara

Secara umum, kerja sama kepabeanan dan cukai selama ini diarahkan untuk meningkatkan upaya pertukaran informasi, *capacity building*, dan program magang (*on the job training*) dalam rangka penindakan (*enforcement*), operasi bersama (*coordinated operation*), informasi harga dan *market intelligence*, serta *best practice* yang selama ini diterapkan. Selain itu, dilakukan pula kerja sama terkait fasilitasi perdagangan dan investasi, terutama melalui studi dan pemberian rekomendasi berdasarkan pengalaman yang dimiliki.

Kementerian Keuangan juga telah memperbarui kesepakatan kerja sama bilateral dengan negara lain, seperti Iran, sebagai landasan kerja sama pertukaran informasi terkait kepabeanan. Selain itu, upaya kerja sama antar otoritas kepabeanan juga dilakukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan kepabeanan dan fasilitasi perdagangan, khususnya dengan mitra dagang non-tradisional.

Lebih lanjut, upaya peningkatan kerja sama dalam rangka harmonisasi sistem kepabeanan guna mendorong kelancaran sistem perdagangan internasional, terutama dengan negara-negara anggota ASEAN, APEC, dan *World Customs Organisations* (WCO) juga terus dilakukan. Khusus untuk negara-negara CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) direncanakan akan memberikan pelatihan kepabeanan dalam kurun waktu satu hingga dua tahun mendatang.

Di luar kawasan ASEAN, Kementerian Keuangan meningkatkan kerja sama dengan otoritas kepabeanan Inggris sebagai upaya untuk mengambil peluang kerja sama pasca-Brexit, yang diharapkan dapat memperlancar arus barang ke Inggris. Sementara itu, untuk kawasan Eropa, DJBC berinisiatif untuk bekerjasama dengan otoritas kepabeanan Belanda (*Customs Administration of the Netherlands/CAN*) yang diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi produk-produk Indonesia ke negara-negara lain di Eropa. Khusus dengan otoritas Belanda, DJBC telah beberapa kali melakukan kegiatan pengembangan kapasitas berupa *workshop* dengan mengundang narasumber dari CAN, dan kegiatan berupa *on the job training* dimana pegawai DJBC yang berkompeten dikirim untuk mengikuti pelatihan di Belanda.

Dalam beberapa kesempatan, DJBC bahkan mendapat kepercayaan untuk memberi pelatihan dan *knowledge sharing* kepabeanan bagi otoritas kepabeanan negara lain (seperti halnya Fiji, Timor Leste, Yordania dan Mesir), terkait upaya pencegahan dan investigasi pelanggaran kepabeanan, serta *Indonesia National Single Window* (INSW). Kerja sama ini diyakini menjadi suatu strategi DJBC untuk meningkatkan kerja sama dengan otoritas bea dan cukai di negara-negara mitra.

Sejauh ini, kerja sama kepabeanan lebih banyak menggunakan pendekatan regional maupun multilateral dibanding pendekatan bilateral. Kerja sama bilateral tidak banyak dilakukan mengingat otoritas bea dan cukai di banyak negara telah mrujuk pada standar-standar internasional yang telah disepakati dalam WCO, sehingga posisi maupun teknik operasionalnya relatif sama.

Di luar kerja sama teknis antar otoritas kepabeanan, DJBC juga terlibat aktif dalam negosiasi kerja sama perdagangan bebas baik secara bilateral maupun regional. Saat ini, DJBC terlibat dalam beberapa kerja sama perdagangan seperti IJEPA, IA-CEPA, dan IC-CEPA, yang sedang dalam proses negosiasi.

Lepas dari capaian yang diperoleh selama ini, koordinasi antarkementerian, khususnya terkait kerja sama perdagangan, dirasa masih belum optimal karena adanya perbedaan cara pandang. Satu pihak menghendaki peningkatan arus perdagangan, sementara pihak lain berupaya untuk secara hati-hati mengatur arus masuk barang. Dalam kaitan ini, reposisi otoritas bea dan cukai, apakah sebagai *border protection authority* atau sebagai *revenue collection unit*, menjadi penting untuk menentukan arah koordinasi dan karakter kerja sama bilateral di masa mendatang.



c. Dukungan negosiasi perjanjian perdagangan dan investasi

Optimalisasi kerja sama perdagangan internasional dilakukan melalui negosiasi ulang atas perjanjian perdagangan dengan beberapa mitra dialog antara lain Jepang Australia, dan Uni Eropa. Perjanjian perdagangan bilateral dinilai lebih efektif untuk membuka pasar ekspor baru, di saat upaya melalui forum multilateral berjalan lambat. Dalam kaitan ini, Kementerian Keuangan secara aktif memberikan masukan dan posisi atas tarif barang, tata aturan perdagangan jasa, serta akses pasar, khususnya jasa keuangan.

Di sisi investasi, Kementerian Keuangan dalam berbagai forum pertemuan bilateral, terus mendorong negara mitra untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pesan utama yang disampaikan adalah adanya perbaikan iklim investasi dan perbaikan kerangka regulasi yang lebih memberikan kepastian kepada investor. Satu di antaranya adalah dengan mempromosikan berbagai upaya deregulasi peraturan-peraturan yang menghambat, maupun insentif bagi para investor.

Hingga Januari 2017, Indonesia termasuk negara ke-tiga di Asia dan nomor 10 di dunia, yang menjadi tujuan paling menarik untuk berinvestasi. Upaya yang dilakukan dalam hal perbaikan iklim investasi juga membuahkan perbaikan dalam *ease-of-doing-business index* dan *rating outlook*.

Kementerian Keuangan juga berkontribusi untuk memastikan agar perjanjian investasi antar negara tidak berdampak negatif terhadap pendapatan negara. Beberapa perjanjian investasi yang diikuti oleh Kementerian Keuangan antara lain dengan Uni Emirat Arab, Singapura, dan Qatar. Beberapa isu yang selama ini menjadi perhatian Kementerian Keuangan dalam perjanjian investasi antara lain: *Expropriation*, *National Treatment*, *Most-Favored Nation-MFN*, *Transfer and Balance of Payment Measures*, termasuk *Bilateral Payment Arrangement*.

Meski sudah banyak hal yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam mempromosikan investasi, hingga saat ini terdapat beberapa isu yang dirasa oleh beberapa negara mitra masih belum tertangani secara maksimal. Isu-isu terkait investasi yang menurut mitra bilateral masih perlu mendapatkan perhatian antara lain: (i) implementasi paket kebijakan; (ii) koordinasi investasi antara pemerintah pusat dan daerah; (iii) perubahan peraturan yang tiba-tiba tanpa konsultasi; serta (iv) proses perijinan dan persyaratan bagi pekerja asing yang rumit.

Hal lain yang masih menjadi kendala dalam kerja sama perdagangan adalah belum kuatnya koordinasi di antara unit-unit di dalam Kementerian Keuangan maupun dengan kementerian/lembaga lain. Penentuan posisi Indonesia seringkali mengalami dilema karena berbagai kepentingan sektoral yang harus diakomodasi.

Kerja sama bilateral dalam mendukung pengelolaan pembiayaan dan hibah yang optimal dan prudent

Untuk menjaga momentum pertumbuhan dan mewujudkan agenda pembangunan, selama sepuluh tahun terakhir, diperlukan dukungan anggaran yang besar. Hal ini juga berdampak pada tingginya kebutuhan pembiayaan yang harus dipenuhi terutama untuk menutup kebutuhan belanja infrastruktur, program kesejahteraan berkelanjutan, penguatan pertahanan dan keamanan, tambahan alokasi dana pendidikan, serta kebutuhan stimulus fiskal.

Instrumen fiskal yang digunakan dalam memenuhi tingginya kebutuhan pembiayaan dalam APBN adalah melalui utang. Dalam melakukan pemenuhan kebutuhan pembiayaan melalui utang, Kementerian Keuangan memperhatikan kapasitas fiskal berdasarkan asas kehati-hatian.

Program dan kegiatan Kementerian Keuangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan, antara lain dilaksanakan melalui pengembangan instrumen pembiayaan dan perluasan basis investor agar diperoleh fleksibilitas dalam memilih sumber utang yang lebih sesuai kebutuhan, dengan biaya yang minimal, dan risiko yang terkendali.

Beberapa kerja sama bilateral yang telah dilakukan antara lain dengan mengembangkan potensi pembiayaan dengan mitra bilateral seperti dengan *Japan Bank for International Cooperation* (JBIC), *Japan International Cooperation Agency* (JICA), *Agence Francasie de Developpement* (AFD), *Kreditanstalt für Wiederaufbau* (KfW), dan *Saudi Fund for Development* (SFD) untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur.

Sejak 2004, Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang asing di pasar internasional guna menutup keterbatasan daya serap SUN dalam negeri, meningkatkan cadangan devisa, serta mengantisipasi kondisi pasar keuangan yang penuh ketidakpastian. Untuk membuka potensi pasar keuangan internasional, Kementerian Keuangan juga mengembangkan potensi portofolio pinjaman dengan mitra bilateral melalui penerbitan *Samurai Bond* di Tokyo dan *Komodo Bond* di London. Selain itu, Kementerian keuangan juga giat mempromosikan pembiayaan berbasis syariah sebagai bagian dari alternatif sumber pembiayaan, terutama kepada negara-negara Timur Tengah.

Sejalan dengan program-program di atas, Kementerian Keuangan melakukan mitigasi mekanisme pembiayaan berkesinambungan yang disesuaikan dengan kapasitas fiskal. Salah satu yang telah dilakukan adalah melalui negosiasi mekanisme pemberian pinjaman menggunakan *direct lending* dan *rescheduling* pembiayaan proyek, untuk mengurangi tekanan atas kapasitas fiskal. Pemberian pinjaman langsung tanpa garansi, misalnya, diperoleh pemerintah Indonesia dari JBIC untuk PT. PLN sebesar USD310 juta, yang disampaikan pada Forum Dialog Kebijakan ke-6 antara Kementerian Keuangan dan JBIC, bulan Oktober 2016. Skema ini memungkinkan PT. PLN memperoleh dukungan keuangan tanpa membebani anggaran pemerintah.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga menerapkan asas kehati-hatian pada komposisi utang pemerintah dalam rangka mitigasi risiko nilai tukar guna menjaga stabilitas kapasitas fiskal. Profil utang pemerintah sampai dengan September 2017 didominasi oleh mata uang rupiah sebesar 59%. Total utang Indonesia terdiri dari pinjaman sebesar 19,1%, dimana

8,1% dari total pinjaman Indonesia merupakan pinjaman bilateral. Sementara itu, penjualan surat berharga sebesar 80,9%.

Evaluasi yang komprehensif atas penerimaan hibah sebagai alternatif dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan yang lebih spesifik juga selalu dilakukan. Kementerian Keuangan juga terus melakukan evaluasi kegiatan yang dibiayai oleh hibah secara berkala untuk memastikan keberlangsungan pembiayaan dan program agar tidak membebani APBN dan memberikan manfaat terhadap pembangunan Indonesia. Berdasarkan laporan pinjaman dan hibah Bappenas, pada kuartal I 2017, Kementerian Keuangan menerima total hibah sampai dengan USD14,3 juta dimana terdapat 6 jenis hibah bilateral dengan total USD4,2 juta. Dari total hibah bilateral kepada Kementerian Keuangan, empat diantaranya merupakan hibah yang berkelanjutan dengan total nilai USD3,1 juta.

Kerja sama bilateral dalam rangka mendorong belanja yang produktif dan berkualitas

Kementerian Keuangan mengedepankan aspek transparansi, akuntabilitas dan kredibilitas dalam perumusan pembelanjaan yang produktif dan berkualitas guna mendorong perekonomian Indonesia. Untuk memenuhi ketiga aspek tersebut, maka dalam setiap alokasi anggaran wajib disertai dengan analisis yang kuat baik dari sisi perencanaan, implementasi, dan evaluasi.

Keterlibatan Indonesia dalam kerja sama bilateral selama ini menunjang kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur anggaran melalui *lesson learnt* dengan negara mitra. Dalam kaitan ini, Kementerian Keuangan berupaya menjalin kerja sama bilateral untuk pengelolaan anggaran yang *prudent* dan akuntabel, antara lain:

- Mendorong kerja sama bilateral untuk mendukung penerapan *best-practice* internasional dan solusi alternatif dalam pengelolaan anggaran.

- Mengirimkan pegawai ke negara mitra untuk mempelajari secara langsung proses pengelolaan anggaran dalam skema magang maupun *knowledge sharing program*.
- Melakukan *joint-research* maupun *research co-financing* atas isu-isu yang mendapatkan perhatian nasional seperti pengurangan subsidi pertanian, subsidi minyak, dan jaminan sosial.

Di samping itu, guna mendukung perbaikan pengelolaan anggaran, secara paralel, Kementerian Keuangan juga menjalin kerja sama bilateral terkait perbaikan teknologi informasi, pengelolaan kas, pelaksanaan anggaran, penyempurnaan sistem akuntansi, dan pelaporan. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan memperoleh bantuan teknis khususnya untuk pengelolaan kas dari Pemerintah Amerika Serikat, serta mulai menjajaki kerja sama dengan *Treasury* Rusia dan Hongaria. Sementara itu, untuk perbaikan pengelolaan perbendaharaan dan anggaran negara, Kementerian Keuangan memperoleh dukungan dari beberapa negara mitra seperti Australia, Korea Selatan, dan Rusia dalam bentuk pendidikan/pengembangan kapasitas pegawai, peningkatan infrastruktur teknologi dan *sharing* pengetahuan.

Kerja sama bilateral dalam rangka mendorong belanja yang produktif dan berkualitas seringkali menghadapi tantangan terkait agenda prioritas negara mitra dengan prioritas program yang diharapkan oleh unit-unit terkait di Kementerian Keuangan. Oleh karenanya, ke depan diperlukan penyusunan matriks kebutuhan kegiatan yang dapat dikomunikasikan dengan pihak negara mitra, untuk memperoleh dukungan secara maksimal.



Kerja sama ekonomi
keuangan bilateral ke depan
terutama akan dititikberatkan
pada empat agenda kunci yaitu
penguatan produktifitas dan
daya saing ekonomi, pencapaian
pembangunan berkelanjutan,
penguatan tata kelola ekonomi
keuangan internasional, serta
optimalisasi kerja sama bilateral
demi mendorong penguatan
kapasitas dalam negeri



BAB 3

PETA JALAN KERJA SAMA BILATERAL

Peta jalan kerja sama bilateral mencakup dua hal utama yaitu *prioritas kemitraan* dan *rencana aksi*. Prioritas kemitraan perlu dilakukan mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki serta menjaga efektifitas kerja sama. Sementara itu, rencana aksi diperlukan untuk memfokuskan kerja sama bilateral pada sektor-sektor tertentu yang merefleksikan kepentingan nasional.

Agenda Kunci Kerja Sama Bilateral

Kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral pada masa mendatang akan didasarkan pada kepentingan nasional dalam konteks agenda internasional yang tercakup dalam ruang lingkup tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, baik dalam aspek pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara, serta terkait usaha stabilitas ekonomi makro regional dan global. Kerja sama tersebut perlu dibarengi dengan prinsip keterbukaan, saling menguntungkan, inklusif, dan konsisten dengan norma kerja sama internasional yang berlaku, serta sejalan dengan arah kebijakan pembangunan berkelanjutan yang menitikberatkan pada aspek kehidupan sosial masyarakat, peningkatan kesejahteraan ekonomi, dan pengelolaan kualitas lingkungan hidup.

Kerja sama ekonomi keuangan bilateral ke depan terutama akan dititikberatkan pada empat agenda kunci yaitu: (i) Penguatan produktifitas dan daya saing ekonomi, (ii) Pencapaian pembangunan berkelanjutan, (iii) Penguatan tata kelola ekonomi keuangan internasional, dan (iv) Optimalisasi kerja sama bilateral demi mendorong penguatan kapasitas dalam negeri.

Penguatan daya saing dan produktifitas ekonomi

Kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral diupayakan untuk terus mendorong penguatan produktifitas dan daya saing ekonomi Indonesia, baik yang terkait kondisi keuangan negara maupun penguatan sektor riil di Indonesia. Meskipun Indonesia semakin menunjukkan perbaikan dalam hal daya saing, namun sejumlah perbaikan masih perlu dilakukan. Hal yang sama diperlukan untuk penguatan produktifitas terutama dalam hal penguasaan teknologi dan pengembangan inovasi.

Dalam aspek keuangan negara, terdapat potensi peran kerja sama bilateral yang perlu terus dilanjutkan, guna mendukung usaha mobilisasi sumber-sumber dalam negeri melalui penguatan kerja sama perpajakan internasional, khususnya untuk mendorong transparansi transaksi keuangan dan perpajakan internasional, misalnya melalui implementasi *Automatic Exchange of Information (AEOI)*, mengatasi praktek BEPS, termasuk mengantisipasi

pengembangan ekonomi digital yang melibatkan transaksi lintas negara.

Selain itu, kerja sama bilateral diharapkan pula untuk mendorong pemenuhan kebutuhan akan sumber-sumber pembiayaan pembangunan, antara lain melalui optimalisasi potensi sumber-sumber pembiayaan dan hibah yang ada, terutama bagi pembangunan infrastruktur. Saat ini Indonesia memiliki sumber pembiayaan konvensional yang berasal dari negara mitra/lembaga donor, maupun non-konvensional dalam bentuk kerja sama dengan sektor swasta serta penerbitan surat berharga melalui *institutional investors*.

Di sisi lain, terdapat pula potensi pemanfaatan kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral untuk mendorong pertumbuhan sektor riil Indonesia melalui peningkatan investasi, peningkatan akses ekspor untuk barang dan jasa Indonesia ke pasar-pasar potensial, serta penurunan hambatan *tariff* baik di pasar utama maupun pasar non-tradisional. Dalam hal ini, kerja sama bilateral yang dilakukan Kementerian Keuangan, dapat diupayakan untuk memberikan fasilitasi proses kepabeanaan, serta keterlibatan dalam negosiasi perdagangan sektor jasa keuangan.

Pada saat bersamaan, kerja sama bilateral juga memegang peranan penting untuk melakukan kegiatan relasi publik guna menyampaikan inisiatif kebijakan dan kondisi ekonomi keuangan Indonesia kepada mitra bilateral. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan dan menjaga keyakinan pasar atas stabilitas ekonomi Indonesia, serta mendorong masuknya aktifitas ekonomi ke dalam negeri.

Usaha pengembangan akses pasar tersebut dapat pula dilakukan melalui skema Kerja Sama Selatan-selatan (KSS) yang ditujukan untuk meningkatkan hubungan baik serta mendorong interaksi atas pelaku pasar Indonesia dengan negara mitra bilateral. Dalam kaitan ini, negara-negara di kawasan Pasifik dan Afrika memiliki potensi besar sebagai pasar baru bagi produk-produk Indonesia.

Pencapaian pembangunan berkelanjutan

Kerja sama ekonomi keuangan bilateral, baik dalam konteks kerja sama keuangan negara maupun penguatan sektor riil, diupayakan untuk dapat mendorong pencapaian pembangunan berkelanjutan yang lebih mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan khususnya terkait upaya penanggulangan dampak perubahan iklim, penguatan ketahanan pangan, serta penggunaan energi rendah karbon maupun yang terbarukan.

Dalam konteks kerja sama keuangan negara, terdapat potensi besar kerja sama bilateral yang dapat mendukung pemenuhan kebutuhan pembiayaan pembangunan berkelanjutan baik melalui pinjaman, hibah, pemberian dukungan teknis, maupun bentuk kerja sama lainnya. Hal ini terutama terkait komitmen negara-negara maju untuk mendukung realisasi target-target *Sustainable*

Development Goals (SDGs) di negara-negara berkembang. Dalam kaitan ini, dukungan pembiayaan perlu lebih banyak diarahkan untuk mendukung program-program pengentasan kemiskinan, pelestarian lingkungan, dan distribusi kesejahteraan, yang merupakan agenda penting bagi Indonesia, dan sejalan dengan agenda SDGs 2030. Dua sektor yang sekiranya perhatian dalam kerangka kerja sama bilateral di masa mendatang adalah energi terbarukan dan pengelolaan jasa lingkungan.

Lebih lanjut, peran diplomasi kerja sama bilateral perlu dilakukan untuk mengkomunikasikan realisasi komitmen Indonesia atas agenda-agenda internasional terkait pembangunan berkelanjutan. Di saat yang sama, diplomasi bilateral juga perlu diupayakan untuk mendorong realisasi komitmen negara mitra terkait agenda pembangunan berkelanjutan yang diusung oleh pemerintah Indonesia. Di sisi penguatan sektor riil, kerja sama bilateral perlu diarahkan untuk mendorong partisipasi sektor swasta internasional dalam mencapai agenda pembangunan berkelanjutan, baik melalui insentif fiskal maupun pelaksanaan upaya-upaya diplomasi.

Penguatan tata kelola ekonomi internasional

Kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral diperlukan untuk mendukung penguatan *governance* (tata kelola) ekonomi internasional baik dalam aspek *surveillance* maupun diplomasi di berbagai forum ekonomi internasional. Ketidakstabilan ekonomi dunia yang juga dipicu oleh tingginya ketidakpastian kebijakan yang diambil oleh negara mitra, dalam tingkat tertentu, berpengaruh pada kondisi ekonomi Indonesia. Dalam kaitan ini, kerja sama bilateral memegang fungsi penting terkait pemantauan dan diplomasi atas kondisi ekonomi internasional, terutama potensi *spillover* dari kebijakan maupun kondisi negara mitra bilateral, yang berpotensi mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia.

Kerja sama bilateral memiliki peranan strategis untuk menjalankan fungsi diplomasi terkait isu-isu yang dibahas dalam forum ekonomi regional maupun multilateral, khususnya untuk mendorong kepentingan Indonesia dalam forum-forum tersebut. Peran ini menjadi semakin penting dengan adanya pergeseran penekanan diplomasi internasional yang akhir-akhir ini cenderung ke arah bilateral. Peningkatan pengaruh dan peran

Indonesia dalam penentuan standar transparansi keuangan internasional, atau penguatan posisi Indonesia dalam organ kerja sama internasional, misalnya, memerlukan dukungan diplomasi bilateral meskipun kerangka kerja samanya bersifat multilateral. Dalam konteks regional, pendekatan bilateral juga turut mempengaruhi posisi suatu negara atas sebuah inisiatif kerja sama kawasan. Beberapa kesepakatan yang ada di forum kerja sama keuangan ASEAN+3, misalnya, tercapai melalui pendekatan bilateral.

Penguatan kapasitas dalam negeri

Kerja sama bilateral memegang peranan penting dalam upaya penguatan kapasitas dalam negeri guna mendorong (i) pengembangan sumber daya manusia; (ii) penguatan tata kelola dan organisasi pemerintahan; (iii) penguatan kebijakan fiskal baik dalam aspek penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan khususnya infrastruktur; (iv) pengelolaan ekonomi makro; dan (v) pembangunan sektor riil termasuk ekonomi kreatif, ekonomi digital, dan ekonomi daerah perbatasan.

Penguatan kapasitas tersebut perlu dilakukan melalui optimalisasi dukungan teknis yang berasal dari negara mitra, yang disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan dalam negeri. Kerja sama bilateral untuk peningkatan kapasitas masih perlu dilakukan oleh Kementerian Keuangan sebagai upaya untuk menutup kelemahan/kekurangan yang ada, sekaligus mendukung tercapainya program kerja institusi, memperbaiki kinerja organisasi, dan membangun kapabilitas pegawai.

Selain itu, peningkatan kapasitas perlu dilakukan melalui penguatan konsultasi dan dialog kebijakan dengan negara mitra guna membahas berbagai pengalaman dan praktek terbaik terkait isu-isu ekonomi dan keuangan. Konsultasi dan dialog kebijakan dengan negara mitra juga dapat menjadi sarana diseminasi kebijakan fiskal yang ada saat ini, sekaligus mendiskusikan perkembangan terkini ekonomi regional maupun global berdasarkan landasan empiris maupun teoritis. Selain itu, forum dialog juga berkontribusi untuk mempersiapkan antisipasi atas situasi ekonomi global bersama-sama.

Rencana Aksi

Untuk mewujudkan setiap agenda kunci, perlu dilakukan serangkaian rencana aksi yang melibatkan berbagai pihak, khususnya unit-unit internal Kementerian Keuangan. Rencana aksi dapat berlangsung terus menerus, maupun dengan satu program tertentu yang selesai dalam suatu periode waktu. **Tabel 1** memaparkan rencana-rencana aksi untuk setiap agenda kunci yang menjadi fokus dari kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral di masa mendatang.

Tabel 1
Rencana Aksi dari Elemen-elemen Kunci

Elemen	Rencana Aksi	Frekuensi	Pihak Terkait
Penguatan Daya Saing dan Produktifitas Ekonomi	Percepatan penyelesaian kaji ulang atas Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), khususnya dengan negara-negara mitra strategis.	Sekali	BKF dan DJP
	Penguatan diplomasi dan pengembangan kerja sama dengan mitra bilateral dalam rangka pemanfaatan AEOI untuk meningkatkan penerimaan perpajakan domestik.	Berkelanjutan	BKF dan DJP
	Pengembangan kerja sama dengan mitra bilateral dalam rangka mitigasi praktek BEPS.	Berkelanjutan	BKF dan DJP
	Pemetaan serta pengembangan kerja sama dengan mitra bilateral baik negara maupun lembaga donor potensial untuk optimalisasi sumber dan pengembangan alternatif pembiayaan (PPP, <i>syariah financing</i>, dan model pembiayaan lain) untuk infrastruktur.	Berkelanjutan	BKF dan DJPPR
	Pengembangan model evaluasi atas kebijakan penerimaan negara pada perjanjian perdagangan dan investasi yang telah berjalan, dan yang saat ini tengah dalam proses negosiasi.	Sekali	BKF, DJBC, dan DJP

Elemen	Rencana Aksi	Frekuensi	Pihak Terkait
Penguatan Daya Saing dan Produktifitas Ekonomi	Pengembangan model evaluasi atas kebijakan penerimaan negara pada perjanjian perdagangan dan investasi yang telah berjalan, dan yang saat ini tengah dalam proses negosiasi.	Sekali	BKF, DJBC, dan DJP
	Penguatan dukungan dan pemantauan negosiasi perdagangan, khususnya yang mengatur akses pasar sektor jasa keuangan.	Berkelanjutan	BKF, DJBC, dan DJP
Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan	Pemetaan dan mobilisasi dukungan pendanaan dari negara mitra untuk pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia, termasuk di dalamnya terkait program ekonomi hijau.	Berkelanjutan	BKF, DJPB, DJA, DJP, DJBC, DJPK, DJPPR
	Pengembangan kerja sama dalam rangka penyiapan rekomendasi kebijakan untuk pemberian insentif fiskal yang mendorong investasi hijau dari negara mitra potensial.	Berkelanjutan	BKF, DJP, DJBC, DJPPR
	Penguatan diplomasi terhadap mitra bilateral untuk meningkatkan keyakinan atas komitmen dan pencapaian Indonesia dalam isu pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau.	Berkelanjutan	BKF
	Penguatan diplomasi untuk mendorong realisasi komitmen negara-negara mitra bilateral terkait agenda-agenda pembangunan berkelanjutan, terutama yang selaras dengan agenda nasional Indonesia.	Berkelanjutan	BKF, DJPB, DJA, DJP, DJBC, DJPK, DJPPR
	Peningkatan komunikasi dengan pihak swasta di negara mitra bilateral yang bergerak di sektor ekonomi hijau untuk berinvestasi atau terlibat dalam program di Indonesia	Berkelanjutan	BKF, DJPB, DJA, DJP, DJKN, DJBC, DJPK, DJPPR

Elemen	Rencana Aksi	Frekuensi	Pihak Terkait
Penguatan Tata Kelola Ekonomi Internasional	Penguatan posisi Indonesia pada organisasi internasional yang mengatur transparansi keuangan internasional.	Berkelanjutan	BKF, DJBC, DJP, DJPPR
	Pemanfaatan wadah pertemuan bilateral untuk mendorong agenda-agenda Indonesia pada forum internasional.	Berkelanjutan	Semua Eselon I
	Pengembangan analisis dampak (<i>spillover analysis</i>) atas perubahan ekonomi yang terjadi pada negara mitra.	Berkelanjutan	BKF
Penguatan Kapasitas Dalam Negeri	Melakukan pemetaan kebutuhan dan potensi sumber pendanaan kerja sama pembangunan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan.	Sekali	BKF, SETJEND, dan BPPK
	Meningkatkan dialog dan koordinasi bersama lembaga donor dan kementerian lembaga untuk meningkatkan sinergi dan kualitas kerja sama teknik.	Berkelanjutan	Semua Eselon I
	Meningkatkan pertukaran <i>best practices</i> dengan negara atau lembaga mitra strategis melalui <i>knowledge sharing</i>, program magang, maupun bentuk peningkatan kapasitas lainnya.	Berkelanjutan	Semua Eselon I
	Mengembangkan dialog kebijakan dengan negara mitra strategis, terutama untuk mendiskusikan isu perkembangan ekonomi makro serta kebijakan fiskal dan keuangan secara umum.	Berkelanjutan	Semua Eselon I



Prioritas kemitraaan dalam cetak biru ini diwujudkan dengan mengelompokkan negara-negara mitra melalui penilaian yang mencakup elemen-elemen kunci pada aspek ekonomi dan politik, yaitu kapasitas ekonomi, keterlibatan dalam hubungan internasional, kemampuan keuangan, kemampuan keamanan, serta penguasaan pengetahuankapasitas dalam negeri



BAB 4

PRIORITAS KEMITRAAN

Pola interaksi antarnegara sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan sumber daya yang dimiliki, yang berujung pada peluang/kemungkinan mencapai kepentingan nasional, dalam konteks kerja sama bilateral. Mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang tersedia, prioritas kerja sama, dan sasaran yang ingin diraih, kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral perlu dilakukan secara selektif, dalam arti tidak dilakukan dengan semua negara mitra tanpa mempertimbangkan variasi potensi yang dimiliki. Hal ini bertujuan agar kerja sama yang dilakukan tidak bersifat sporadis, cenderung membuang energi dan waktu, namun tidak ada kejelasan target yang ingin diraih. Oleh karena itu, diperlukan prioritas kemitraan yang diharapkan dapat menjadi acuan dan pertimbangan dalam melakukan kerja sama bilateral.

Kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral juga tidak dapat dipisahkan dari aspek *international payment* dan *international engagement*. Kedua aspek tersebut juga penting dalam pengembangan kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral, terutama sebagai landasan dalam menyusun prioritas kemitraan. *International payment* merupakan cerminan dari *balance of payment*, baik melalui beberapa faktor utama seperti pertumbuhan ekonomi, perdagangan internasional, keuangan global, investasi dan utang. Sementara itu, aspek *international engagement* dicerminkan oleh beberapa faktor antara lain pengaruh di forum internasional, keamanan dan stabilitas, serta penguasaan teknologi.

Elemen Prioritas Kemitraan

Secara garis besar, prioritas kemitraan dalam cetak biru ini diwujudkan dalam pengelompokan negara-negara mitra dengan mempertimbangkan penilaian yang mencakup elemen-elemen kunci pada aspek ekonomi dan politik¹, yaitu: (i) kapasitas ekonomi; (ii) keterlibatan dalam hubungan internasional; (iii) kemampuan keuangan; (iv) kemampuan keamanan; dan (v) penguasaan pengetahuan. Kelima elemen ini merupakan cerminan dari kekuatan suatu negara.

Kapasitas ekonomi

Kapasitas ekonomi suatu negara menunjukkan kemampuan negara tersebut untuk tidak hanya memenuhi pelayanan terhadap rakyatnya, namun mencerminkan daya tawar negara tersebut dalam berinteraksi dengan negara lain. Dalam cetak biru ini,

¹ Elemen-elemen kunci ini diadopsi dari formula *Structural Power*, yang dibuat oleh Susan Strange (1988)

kapasitas ekonomi ditunjukkan oleh tiga indikator yaitu: (i) Kontribusi pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi global; (ii) Keterhubungan dengan ekonomi Indonesia, dan (iii) Kualitas sistem keuangan yang dimiliki negara mitra.

Indikator pertama penting untuk melihat sejauh mana ekonomi suatu negara mitra mempengaruhi ekonomi dunia. Dalam hal ini, kontribusi suatu negara terhadap pertumbuhan ekonomi global diukur dari kontribusinya terhadap GDP dunia.

Semakin besar kontribusinya, maka dapat diasumsikan bahwa negara tersebut memiliki pengaruh yang relatif besar terhadap negara lain, termasuk Indonesia. Sementara itu, indikator kedua mencerminkan tingkat keterhubungan ekonomi Indonesia dengan ekonomi negara mitra, yang ditunjukkan oleh beberapa sub-indikator yang terkait dengan perdagangan, investasi, dan utang. Selanjutnya, indikator ketiga menjelaskan kapasitas ekonomi suatu negara mitra dari sisi kualitas keuangan, di mana negara yang memiliki sistem keuangan yang baik—apalagi menjadi *financial hub*—berpotensi lebih besar untuk mempengaruhi keuangan global. **Tabel 2** menunjukkan deskripsi untuk elemen *kapasitas ekonomi* berikut indikator dan subindikatornya.

Tabel 2.
Kapasitas Ekonomi

Elemen	Indikator	Subindikator	Rasionalisasi
Kapasitas Ekonomi	Kontribusi pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi global	Kontribusi GDP PPP 2017	Seiring dengan semakin besarnya kontribusi pertumbuhan suatu negara terhadap perekonomian global, pengaruh mata uang negara bersangkutan dalam mekanisme <i>international payment</i> , seperti internasionalisasi Reminbi, akan semakin kuat
		Kontribusi GDP PPP 2022	
	Keterhubungan dengan ekonomi dalam negeri Indonesia	Tingkat penetrasi terhadap pasar negara mitra	Ekspor merupakan elemen dari <i>international payment</i> yang menunjukkan tingkat kebutuhan suatu negara atas produk Indonesia.

Elemen	Indikator	Subindikator	Rasionalisasi
Kapasitas Ekonom	Keterhubungan dengan ekonomi dalam negeri Indonesia	Persentase investasi negara mitra di Indonesia	Pembayaran deviden atas investasi asing akan mempengaruhi <i>international payment</i>
		Persentase utang Indonesia ke negara mitra	Pembayaran utang luar negeri akan mempengaruhi <i>international payment</i>
		Persentase kontribusi nilai bersih perdagangan negara mitra	Ekspor merupakan elemen dari <i>international payment</i> dalam hubungan perdagangan
	Kualitas Sistem Keuangan	Kualitas Sistem Keuangan	Negara yang memiliki sistem keuangan yang baik, dan sekaligus menjadi <i>financial hub</i> , berpotensi mempengaruhi <i>international payment</i> negara lainnya melalui mekanisme keuangan global

Keterlibatan dalam hubungan internasional

Keterlibatan suatu negara dalam forum-forum atau kerja sama internasional menunjukkan atensi, paparan (*exposure*), sekaligus peran dan kontribusi negara tersebut dalam proses pengambilan keputusan atau kesepakatan yang menyangkut banyak negara. Dalam konteks cetak biru, keterlibatan negara dalam hubungan internasional ditunjukkan oleh dua indikator yaitu: (i) Potensi merefleksikan kepentingan Indonesia dan (ii) Hubungan bilateral dengan Indonesia.

Potensi yang dimiliki oleh negara mitra untuk membantu memperjuangkan kepentingan Indonesia di berbagai forum kerja sama internasional diindikasikan

oleh, pertama, seberapa besar hak suara mereka di forum-forum internasional. Semakin besar *voting power* yang dimiliki oleh suatu negara mitra, maka dapat diasumsikan bahwa potensi negara tersebut untuk mendorong sebuah agenda/kepentingan, semakin besar. Dengan kata lain, negara tersebut berpotensi lebih besar dibanding negara lain dalam memperjuangkan agenda/kepentingan Indonesia. Kedua, seberapa dekat interaksi Indonesia dengan suatu negara mitra. Kerja sama ini diukur dengan seberapa banyak kerja sama bilateral yang dimiliki oleh Indonesia dengan suatu negara mitra. **Tabel 3** berikut ini memaparkan elemen Keterlibatan dalam Hubungan Internasional beserta indikator dan subindikatornya.

Tabel 3.
Keterlibatan dalam hubungan internasional

Elemen	Indikator	Subindikator	Rasionalisasi
Keterlibatan dalam hubungan internasional	Potensi merefleksikan kepentingan Indonesia	Pengaruh di forum internasional	Suatu negara yang memiliki pengaruh besar pada suatu forum internasional, yang biasanya tercermin dalam kontribusi dan/atau voting power, berpotensi membantu mendukung/memfasilitasi kepentingan Indonesia dalam kerja sama bilateral
		Risiko yang dapat ditimbulkan terhadap Indonesia	Dampak perekonomian negara lain atas suatu negara akan mempengaruhi <i>international payment</i> akibat adanya distorsi perekonomian domestik.
		Kemampuan memengaruhi negara lain	Dalam globalisasi, kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi negara lain, melalui perdagangan maupun investasi misalnya, berpotensi untuk mendukung kepentingan-kepentingan Indonesia dalam kerja sama internasional.
	Hubungan bilateral dengan Indonesia	Jumlah kerja sama bilateral dengan Indonesia	Jumlah kerja sama bilateral yang dimiliki oleh Indonesia dengan suatu negara mencerminkan kedekatan antara kedua negara.

Kemampuan keuangan

Kemampuan keuangan merupakan elemen yang penting dalam menilai kemampuan sebuah negara. Akumulasi keuangan yang dimiliki oleh suatu negara sangat penting dalam interaksi ekonomi internasional, terutama untuk mempengaruhi pasar dan produksi. Suatu indikator untuk menunjukkan hal ini adalah kemampuan memberikan pinjaman kepada negara lain. Negara yang mampu memberikan pinjaman akan berpotensi mendapatkan kontrol atas ekonomi negara lain. Tabel 4 menunjukkan rasionalisasi tentang elemen *Kemampuan Keuangan* berikut indikator dan subindikatornya.

Tabel 4.
Kemampuan Keuangan

Elemen	Indikator	Subindikator	Rasionalisasi
Kemampuan Keuangan	Kemampuan memberikan pinjaman kepada negara lain	Kemampuan memberikan pinjaman kepada negara lain	Kemampuan suatu negara untuk memberikan pinjaman kepada negara lain mencerminkan kemampuan/kekuatan keuangan negara tersebut, yang akan memperkuat engagement negara dalam hubungan internasional.
	Kualitas sistem keuangan	Nilai Kompetitif Sistem Keuangan	Negara yang menjadi financial hub akan mampu mempengaruhi <i>international payment</i> negara lainnya melalui mekanisme keuangan global

Kemampuan keamanan

Kemampuan keamanan menjadi elemen yang juga dapat digunakan untuk menilai suatu negara mengingat keamanan berkontribusi pada proses “siapa mendapat apa” dalam sebuah ekonomi, baik di tataran nasional maupun internasional. Aspek keamanan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas, merupakan prasyarat untuk memaksimalkan kegiatan ekonomi. Terlebih lagi, untuk sebuah kerja sama ekonomi antarnegara, keamanan merupakan syarat untuk sebuah kerja sama bilateral yang sehat, yang memastikan kedua belah pihak memperoleh manfaat yang sama.

Dalam kaitan ini, kemampuan militer dan stabilitas pertahanan merupakan dua indikator yang dinilai dapat mencerminkan kemampuan keamanan suatu negara. Kemampuan militer dapat dilihat dari besaran belanja militer yang dikeluarkan oleh suatu negara, yang tentunya akan berpengaruh terhadap kemampuan menjaga stabilitas keamanan nasional. Sementara itu, jumlah konflik yang terjadi, dan melibatkan sebuah negara mitra, merupakan cermin dari ketidakmampuan negara tersebut mengelola keamanannya. Hal ini diasumsikan akan memberikan kontribusi negatif terhadap kerja sama bilateral. **Tabel 5** memberikan gambaran hubungan antara elemen Kemampuan Keamanan dengan indikator dan subindikatornya.

Tabel 5.
Kemampuan Keamanan

Elemen	Indikator	Subindikator	Rasionalisasi
Kemampuan Keamanan	Kemampuan militer	Nilai belanja untuk militer	Belanja suatu negara untuk kepentingan pertahanan diasumsikan akan berpengaruh pada stabilitas keamanan di berbagai tingkatan, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada makin besarnya potensi kerja sama bilateral.
	Stabilitas pertahanan	Jumlah konflik yang melibatkan negara mitra	Kemampuan suatu negara untuk tidak berkonflik dengan negara lain mencerminkan potensi kerja sama yang lebih besar yang dimiliki oleh negara tersebut.

Penguasaan pengetahuan

Penguasaan suatu negara atas pengetahuan juga merupakan elemen penting dalam menilai kemampuan suatu negara. Sebuah negara yang menguasai pengetahuan diasumsikan akan banyak memberikan kontribusi terhadap inovasi dan produksi, yang berujung pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, negara dengan tingkat penguasaan pengetahuan yang tinggi berpotensi untuk membantu Indonesia dalam memperbaiki kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (ditunjukkan dalam **Tabel 6**).

Tabel 6.
Penguasaan Pengetahuan

Elemen	Indikator	Subindikator	Rasionalisasi
Penguasaan pengetahuan	Tingkat penguasaan teknologi	Kontribusi Persentase Hak Paten	Jumlah hak paten suatu negara mencerminkan kemampuan penguasaan teknologi dan pengetahuan yang dimiliki, yang berpotensi membantu Indonesia dalam meningkatkan kapasitas manusia dan kemampuan berinovasi, yang berujung pada perbaikan ekonomi.

Keterkaitan antara Agenda Kunci Kerja Sama dan Prioritas Kemitraan

Agenda kunci kerja sama dan indikator-indikator dalam prioritas kemitraan selanjutnya dihubungkan satu sama lain untuk melihat pemetaan isu-isu spesifik yang berpotensi dibawa dalam kerja sama bilateral dengan suatu negara mitra. Tidak semua indikator terhubung langsung dengan agenda kunci kerja sama. Dalam hal ini, hanya indikator-indikator yang relevan dengan keempat agenda kunci kerja sama saja, yang digunakan untuk memetakan negara-negara mitra berikut area potensi kerja samanya.

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan, diperoleh hasil sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 7 berikut ini.

Tabel 7.
Matriks keterkaitan Agenda Kunci Kerja Sama dan Prioritas Kemitraan

AGENDA	Produktifitas dan Daya Saing	Pembangunan Berkelanjutan	Tata Kelola Tataran Ekonomi Internasional	Pembangunan Kapasitas
INDIKATOR	Kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi global	Potensi merefleksikan kepentingan Indonesia	Potensi merefleksikan kepentingan Indonesia	Kemampuan memberikan pinjaman kepada negara lain
	Keterhubungan dengan ekonomi dalam negeri Indonesia	Tingkat penguasaan teknologi	Kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi global	Tingkat penguasaan teknologi
	Tingkat penguasaan teknologi	Hubungan bilateral dengan Indonesia		Kualitas sistem keuangan
	Kualitas sistem keuangan	Kemampuan militer		Kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi global

Dari pemetaan yang dilakukan, terlihat bahwa tiap-tiap negara mitra memiliki area potensi kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral yang bervariasi. Terdapat negara-negara yang memiliki potensi yang merata untuk semua agenda kerja sama, namun terdapat pula yang hanya kuat di satu agenda saja.

“
Prioritas kemitraaan dalam cetak biru ini diwujudkan dengan pengelompokkan negara-negara mitra melalui penilaian yang mencakup elemen-elemen kunci pada aspek ekonomi dan politik , yaitu kapasitas ekonomi, keterlibatan dalam hubungan internasional, kemampuan keuangan, kemampuan keamanan, serta penguasaan pengetahuan



BAB 5

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI

Kebutuhan Infrastruktur untuk Implementasi (*Enabling Environment*)

Implementasi cetak biru kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral membutuhkan koordinasi dan konsultasi dari berbagai pihak yang terkait, baik di dalam Kementerian Keuangan maupun dari pihak eksternal. Konsultasi dan koordinasi dengan unit-unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah dilakukan dalam menyusun cetak biru ini, juga akan dilakukan kembali secara periodik untuk memastikan kesesuaian dan sinergisme agenda di antara unit-unit terkait. Di samping itu, konsultasi antar unit diharapkan akan membangun rasa memiliki yang lebih besar atas rencana aksi yang telah ditetapkan.

Di saat yang sama, dukungan eksternal terutama dari kementerian/ lembaga lain yang terkait, diperlukan

untuk memastikan bahwa agenda kerja sama bilateral yang diusung Kementerian Keuangan berjalan baik dan terukur. Dalam kaitan ini, dukungan kementerian/ lembaga lain dalam berbagi data maupun informasi diharapkan akan memperkuat strategi kebijakan kerja sama bilateral, terutama untuk isu-isu yang bersifat lintas sektoral. Selain itu, komunikasi dan koordinasi yang kuat khususnya dengan perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di negara-negara strategis, mendesak untuk dibangun guna memastikan dukungan diplomasi bilateral di masa mendatang.

Penggunaan dukungan teknologi untuk proses konsultasi, koordinasi, maupun berbagi data mutlak diperlukan. Teknologi berkontribusi mendorong ketiga proses tadi berjalan lebih cepat dan akurat. Walau demikian, proses konsultasi, koordinasi, dan berbagi data secara tradisional juga masih perlu dilaksanakan.

Dengan proses konsultasi, koordinasi, maupun berbagi data secara berkala, diharapkan akan terjadi penguatan kapasitas kerja sama bilateral, yang berujung kepada tersalurkannya kepentingan Indonesia terhadap negara-negara mitra bilateral secara lebih baik, dan memiliki dampak positif terhadap Indonesia.

Cetak biru ini kedepannya dapat menjadi panduan bersama bagi unit-unit kerja di Kementerian Keuangan, dan masukan bagi institusi di luar Kementerian Keuangan. Dengan adanya panduan ini, perbedaan pandangan antar institusi diharapkan akan dapat dikurangi, yang nantinya bermuara terhadap sinergi yang kuat dari unit-unit kerja terkait.

Review Periodik

Cetak biru ini akan dievaluasi secara periodik untuk memastikan kesesuaiannya dengan dinamika nasional maupun internasional. Evaluasi secara periodik akan dilakukan setiap tiga tahun, namun tidak menutup kemungkinan untuk dipercepat, manakala diperlukan. Selain itu, evaluasi juga akan dilakukan pada waktu-waktu tertentu, dimana ada kejadian penting di negara mitra yang dapat menimbulkan dampak internasional, dan juga dampak terhadap Indonesia, terutama dari sisi potensi kerja sama ekonomi dan keuangan.

